

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah teori yang muncul ketika ada dua pihak yang saling terikat, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memakai jasa. Hubungan keagenan adalah sebagai kontrak, dimana satu atau beberapa orang (*principal*) mempekerjakan orang atau pihak lain (*agen*) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan. Dari sini dapat diketahui bahwa manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua keputusan terhadap pengguna laporan keuangan, termasuk investor, *stakeholders*, pemegang saham, dan kreditor.

Jensen dan Meckling dalam (Lestari, 2016) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agen*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut.

Menurut (Wafiroh, 2015), memaparkan dari sudut pandang manajemen keuangan, salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau *stakeholder*. Tujuan tersebut sering kali hanya bisa mencapai apabila tanggung jawab pengelolaan perusahaan diserahkan kepada para profesional, dikarenakan para pemilik modal memiliki banyak keterbatasan. Para profesional ini disebut dengan manajer atau agen. Manajer diberi kekuasaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dalam hal ini menciptakan konflik potensial atas kepentingan yang disebut dengan teori agen (*agency theory*). Beberapa penyebab konflik keagenan ditinjau dari beberapa kondisi, yaitu penggunaan arus bebas (*free cash flow*) pada aktivitas yang tidak menguntungkan, peningkatan kekuasaan manajer dalam melakukan *investment*, dan *consumption of excessive perquisites* atau disebabkan oleh perbedaan keputusan investasi antara investor dengan manajer. Investor memilih risiko tinggi untuk mendapatkan *return* tinggi, sedangkan manajer memilih risiko rendah untuk mempertahankan posisi atau sebaliknya dalam perusahaan.

2.1.2 Teori Pajak

Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat soemitro, SH : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2011:1)

Pada pasal 1 UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP. Adapun subjek dari PPh Badan yaitu wajib pajak badan dalam negeri dan wajib pajak badan luar negeri. Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan. Karena terjadi perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya dalam menentukan Pajak Penghasilan antara perpajakan dengan

- Pajak Penghasilan yang dihitung berbasis pada Penghasilan Kena Pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah, disebut sebagai PPh terutang sedangkan Pajak Penghasilan yang dihitung berbasis Penghasilan Sebelum Pajak disebut sebagai Beban Pajak. Sebagian perbedaan yang terjadi akibat perbedaan antara PPh Terutang dengan Beban Pajak, sepanjang menyangkut perbedaan waktu, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial, baik dalam akun aset pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan dapat disamakan seperti lebih bayar pajak, yang akan diganti di masa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer. Sementara itu, kewajiban pajak tangguhan dapat disamakan seperti kurang bayar pajak, yang akan dibayar di masa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer. Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak. Dengan adanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ETR, maka perusahaan akan dapat mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya perusahaan bayarkan untuk pajak. Oleh karena perbedaan waktu direalisasikan di masa yang akan datang maka untuk mengukur tarif pajak efektif atas pajak yang sesungguhnya dibayar perusahaan digunakan cash ETR (pembayaran pajak secara kas) sebagai proksi dalam penelitian ini. Cash ETR merupakan rasio pembayaran secara kas (cash taxes paid) atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014)

2.1.2.2 Jenis Pajak

Menurut golongannya, pajak terdiri dari :

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut sifatnya, pajak terdiri dari:

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang dasarnya adalah sibjenya, dalam arti. Memfokuskan pada diri wajib pajak, dalam arti memperjatkan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang dasarnya adalah objeknya, dalam arti tidak memfokuskan pada diri wajib pajak.(Mardiasmo, 2011:5)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2.3 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undang perpajakan dalam menentukan jumlah pajak terutang yang dikenakan terhadap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan.(Mrdiasmo, 2011:9) Beberapa metode yang digunakan untuk mempersentasikan tarif pajak adalah :

- a. Tarif pajak statutory (*statutory tax rate*), yaitu tarif pajak yang ditetapkan oleh hukum atas dasar pengenaan tertentu.
- b. Tarif pajak rata-rata (*average tax rate*), yaitu rasio antara jumlah pajak yang dibayarkan (hutang pajak) dengan dasar pengenalan pajak (laba kena pajak).
- c. Tarif pajak marjinal (*marjinal tax rate*), yaitu tarif pajak yang berlaku untuk kenaikan suatu dasar pengenaan pajak. Tarif pajak marjinal dapat dihitung dengan membandingkan perbedaan hutang pajak dan perbedaan laba kena pajak.
- d. Tarif pajak efektif (TPE), yaitu tarif aktual yang sebenarnya berlaku. TPE merupakan persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar perencanaan pajak tertentu.

2.1.2.4 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak,(Mrdiasmo, 2011:1) yaitu:

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengukur untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2 Kepemilikan Asing

Dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh Negara Asing, perseorangan Warga Negara Asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing, yang dapat dirumuskan (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014).

Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan disebut sebagai pemegang saham pengendali asing. Pemegang saham pengendali asing dalam perusahaan yang stuktur kepemilikannya terkonsentrasi akan lebih mementingkan kesejahteraannya. Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain sering disebut sebagai ekspropriasi. Sebagai contoh, pemegang saham pengendali asing dapat mentransfer dana dan aset perusahaan lainnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Caranya melalui praktek transfer pricing: pemegang saham pengendali asing

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan kepada perusahaan pribadinya pada harga di bawah pasar. Ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali asing akan menurunkan nilai perusahaan sehingga merugikan pemegang saham non pengendali (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014).

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Di perusahaan-perusahaan Asia terutama di Indonesia menggunakan menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali. (Refgia, 2017).

2.3 Ukuran Perusahaan

Surbakti (2012), mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil. Semakin besar aset suatu perusahaan dapat disimpulkan bahwa kompleksitas yang dimiliki perusahaan juga bertambah luas, termasuk pengambilan keputusan keputusan manajemen. Ukuran perusahaan dapat menentukan banyak sedikitnya praktik *transfer pricing* pada perusahaan. Pada perusahaan yang berukuran relative lebih besar akan dilihat kinerjanya oleh masyarakat sehingga para direksi atau manajer perusahaan tersebut akan lebih berhati-hati dan transparan dalam

melaporkan kondisi keuangannya. Sedangkan perusahaan yang berukuran lebih kecil dianggap lebih mempunyai kecenderungan melakukan transfer pricing untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan.(Refgia, 2017)

2.4 Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Maka, karna berdasarkan tingkat laba direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Purwanti (2010), Tantiem / bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota Direksi setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba. Sistem pemberian kompensasi bonus ini dapat membuat para pelaku terutama manajer diperusahaan dapat melakukan perekrutasaan terhadap laporan keuangan perusahaan agar memperoleh mekanisme bonus yang maksimal.(Refgia, 2017)

Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan untuk memperoleh bonus dalam mengelola perusahaan. Pemilik perusahaan tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang dapat menghasilkan laba untuk divisi atau subunit, tetapi juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Kompensai (bonus) direksi dilihat dari kinerja berbagai divisi atau tim dalam satu organisasi. Semakin besar laba perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan. Oleh sebab itu, direksi mampu mengangkat laba pada tahun yang diharapkan yaitu dengan menjual persediaan kepada antarperusahaan satu grup dalam perusahaan multinasional dengan harga dibawah pasar. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan perusahaan dan meningkatkan laba pada tahun tersebut.

Mengingat bahwa mekanisme bonus berdasarkan pada besarnya laba, yang merupakan cara yang paling populer dalam memberikan penghargaan kepada direksi/manajer, maka logis bila direksi yang remunerasinya didasarkan pada tingkat laba akan memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan-perusahaan dalam keseluruhan. Karena sebagai akibat adanya praktek *transfer pricing* maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit. Merujuk kepada pendapat Horngren (2008: 428) dalam Lestari (2016), yang menyebutkan bahwa kompensasi bonus dilihat berdasarkan tim bervariasi diberbagai divisi dalam satu organisasi.

2.5 Transfer Pricing

Gunadi : *transfer pricing* merupakan jumlah harga atas penyerahan (*transfer*) barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis maupun finansial (Lestari, 2016). Dalam konteks praktik penghindaran pajak maka modus *transfer pricing* yakni dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

merekayasa pem-bebanan harga transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan. *Transfer pricing* dapat terjadi dalam satu grup perusahaan dan antar perusahaan yang terikat dalam hubungan istimewa. Pengertian *transfer pricing* sebagai harga yang ditimbulkan akibat penyerahan barang, jasa dan harta tak berwujud, seperti yang telah disebutkan di atas merupakan pengertian yang netral.

Akan tetapi, istilah *transfer pricing* juga sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik (*abuse of transfer pricing*), yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak (*taxation income*) dari suatu perusahaan multinasional ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan nasional tersebut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah satu harga diperhitungkan.

Jadi dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *transfer pricing* merupakan harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di *transfer* ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dimana salah satu

2.5.1 *Transfer Pricing* Menurut Akuntansi

Dalam perkembangannya dan seiring dengan kemajuan teknologi informasi, implementasi *transfer pricing* sudah meluas yaitu antar perusahaan-perusahaan dalam satu grup. Hal ini disebut *intercompany transfer pricing*, dan tujuannya adalah memaksimalkan laba dan sekaligus meminimalkan beban pajak (*tax expenses*). (Hutagaol, 2007:45-46)

Profit center adalah pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab pada beberapa pengukuran laba yang berbeda antara pendapatn yang dihasilakn dan biaya yang menghasilakn pendapatan tersebut. Terminologi bisnis sering tidak tepat dan beberapa perusahaan merujuk pusat investasi mereka sebagai pusat laba. Ada perbedaan konseptual antara pusat laba dan pusat investasi, yaitu manajer pusat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laba bertanggung jawab pada laba tetapi tidak pada investasi yang menghasilkan keuntungan.

b. Hubungan Istimewa (*Related Parties*)

Berdasarkan pemaparan diatas, jelas terlihat bahwa kegiatan *transfer pricing* ini dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan perusahaan afiliasinya terutama yang terletak di negara yang termasuk *tax heaven countries*. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kegiatan *transfer pricing* ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Menurut PSAK 7: “Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional”

Transaksi antara Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah suatu pengalihan sumberdaya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. (Kurniawan, 2015:20-21).

c. Transaksi Pihak Berelasi

Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumberdaya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan, contohnya: pembelian atau penjualan barang (barang jadi atau setengah jadi), pembelian atau penjualan properti dan aset lain.(www.blogspot.co.id)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Perusahaan Induk

Perusahaan induk merupakan perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang tergabung kedalam satu grup perusahaan. Melalui pengelompokan perusahaan kedalam induk perusahaan, dimungkinkan terjadinya peningkatan atau penciptaan nilai pasar perusahaan (*market value creation*). Seperti perusahaan induk menjual produk ke anak perusahaan dengan harga pasar untuk memindahkan labanya supaya beban pajak rendah dengan melakukan *transfer pricing*. (www.wordpress.com)

Perusahaan anak dalam dunia bisnis, merupakan sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang terpisah dan perusahaan yang dikuasai oleh pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui satu atau lebih perusahaan lainnya. Anak perusahaan adalah hal yang umum dalam bisnis, dan sebagian besar perusahaan multinasional mengatur operasi perusahaannya dengan cara *transfer pricing*. (www.wikipedia.com)

2.5.2 Transfer Pricing Dalam Peraturan

a. Perpajakan Indonesia

Peraturan tentang *transfer pricing* secara umum diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Aturan lebih lanjut dan detail tentang *transfer pricing* termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

2.5.3 Hukum Praktik *Transfer Pricing* dalam Pandangan Islam

Dengan melihat jalannya transaksi *Transfer Pricing* secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi *Transfer Pricing* dikategorikan ke dalam transaksi jual beli (*Al-bay*). Jika di cermati rukun dan syarat jual beli, maka transaksi *Transfer Pricing* telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga transaksi *Transfer Pricing* tergolong transaksi jual beli yang sah (Achmadiyah 2013). Transaksi rekayasa pajak pada *Transfer Pricing* dalam menaikkan- turunkan harga baik harga penjualan (ekspor) dan harga pembelian (impor) tergolong perbuatan zalim. Karena telah merugikan pemerintah. Dimana pendapatan pemerintah menjadi berkurang karena pajak yang diterimanya kecil. Sebagaimana ayat Al-Qur'an surah An-ahl Ayat 90 yang menerangkan tentang pemerintah untuk menjauhi perbuatan zalim danarogansi didalam kehidupan.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah SWT melarang dari perbuatan keji, kemungkaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah SWT melarang manusia mengambil keuntungan dengan jalan yang lain kecuali perniagaan atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdagangan, dan dalam perniagaan tersebut apabila ingin mengambil keuntungan hendaknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam.

Pada transaksi *transfer pricing* ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah orang yang berakad. Dalam hal ini penjual dan pembeli adalah perusahaan induk atau perusahaan cabang. Yang kedua yaitu *sigat* (lafal *ijab* dan *qabul*). Penyerahan barang dan jasa pada *transfer pricing* dilakukan melalui pengiriman yang diwakili dengan dokumen atau faktur pengiriman dan faktur penerimaan barang / jasa sehingga *ijab-qabul*-nya tidak dengan berhadapan secara langsung. Tetapi melalui dokumen *ijab-qabul* seperti ini dinyatakan sah. Rukun yang ketiga yaitu adanya barang yang diperjualbelikan (*ma'qud;alaih*). Salah satu syarat *ma'qud;alaih* adalah suci, milik sendiri, tidak ditaklikkan, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, dan mempunyai manfaat. Rukun yang keempat adalah barang. Harga dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu *al-thaman* dan *al-si'r.al-si'r* adalah harga yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-thaman* adalah harga diantara sesama pedagang sebelum barang itu dijual kepada konsumen (harga modal awal barang). Pada transaksi *transfer pricing*, harga yang berlaku diantara kedua belah pihak sudah sesuai kesepakatan, karena pihak yang bertransaksi itu masih terikat dalam hubungan istimewa (Achmadiyah, 2013)

Terkait dengan rukun diatas, maka boleh saja terjadi penjualan dibawah atau diatas harga pasar apabila diantar kedua belah pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) dilandasi oleh prinsip suka sama suka, karena inti dari jual beli adalah adanya kerelaan dari masing-masing pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ قَرَضٍ (رواه ابن ماجه)

“Rasullullah SAW bersabda : “Sesungguhnya jual beli harus didasarkan kepada saling merelakan”(HR. Ibnu Majah).

Transaksi *transfer pricing* sendiri sebenarnya sah dilakukan apabila ditujukan untuk motif bukan pajak, yaitu untuk pengendalian manajemen, pengendalian pasar, dan sebagainya karena jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli, transaksi *transfer pricing* sudah memenuhinya. Tetapi dalam penelitian ini menggambarkan bahwa rekayasa *transfer pricing* dilakukan dengan cara mengalihkan keuntungan suatu perusahaan di negara bertarif pajak tinggi ke perusahaan cabang yang berada di negara bertarif pajak rendah (*tax-haven*) melalui *transfer pricing*. Salah satunya dengan melakukan penjualan atau pembelian dengan harga yang berbeda dari harga pasar, sehingga pajak yang dibayar menjadi lebih kecil. Akibatnya pendapatan negara dari sektor pajak menjadi berkurang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa transaksi rekayasa *transfer pricing* dalam perspektif hukum islam tergolong perbuatan *zalim* walaupun secara substansi transaksi *transfer pricing* tergolong jual beli yang sah.

... إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ.. (رواه ابو داود)

“...Sesungguhnya Allah SWT.-lah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki...”.53 (HR. Abu Dawud).

Tindakan diatas menetapkan harga transfer ini tidak termasuk penetapan harga yang *zalim*, tetapi termasuk *al-tas'ir al-jabari* karena memang diperlukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sesuai dengan kondisi yang ada, demi menyelamatkan keuangan negara dari kerugian. Oleh sebab itu pemerintah menetapkan harga transfer di antara pihak-pihak yang terikat dalam hubungan istimewa untuk mengurangi terjadinya rekayasa pajak melalui *transfer pricing*.

2.5.4 Sektor Aneka Industri

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari beberapa sub sektor yaitu, sub sektor otomotif dan komponen, sub sektor tekstil dan garmen, sub sektor alas kaki, sub sektor kabel, dan sub sektor elektronika yang perkembangannya terbilang pesat. Banyaknya emiten yang bergabung dalam sektor aneka industri (Adindya, 2013).

Berdasarkan SK Menperin No 19 M/SK/1986

- a. Industri kimia dasar, yaitu industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Contoh : industri kertas, semen, pupuk, selulosa dan karet.
- b. Industri mesin dan logam dasar, yaitu industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau barang setengah jadi. Contoh : industri elektronika, mesin, pesawat terbang, perkakas, alat berat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Aneka industri, yaitu industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen. Contoh : industri pangan, tekstil, kimia dasar, aneka industri bahan bangunan.
- d. Kelompok industri kecil, yaitu industri dengan modal kecil atau peralatan yang masih sederhana. Contoh : industri rumah tangga.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, mekanisme bonus pada *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016, ini merupakan rujukan dari beberapa penelitian sebelumnya (Reflikasi) yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1
Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil
1	Nancy Kiswanto (2014)	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Pajak (X1), Kepemilikan Asing (X2), Dan Ukuran Perusahaan (X3) <i>Transfer Pricing</i> (Y)	Regresi Logistik	- Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap <i>Transfer Pricing</i> - Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>Transfer Pricing</i>
2	Novi Lailliyul Wafiroh (2014)	Pengaruh Pajak, <i>Tunelling Incentive</i> , dan Mekanisme Bonus pada <i>Transfer Bonus</i>	Pajak (X1), <i>Tunelling Incentive</i> (X2), Dan Mekanisme Bonus (X3) <i>Transfer Pricing</i>	Regresi Logistik	- Pengaruh Pajak dan <i>Tunelling Incentive</i> berpengaruh positif terhadap

© Hak cipta milik

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			(Y)		<i>Transfer Pricing</i> - Mekanisme Bonus berpengaruh negatif terhadap <i>transfer Pricing</i>
3	Thesa Refgia (2015)	Pengaruh pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan <i>Tunelling Incentive</i> terhadap <i>Transfer Bonus</i>	Pajak (X1), Mekanisme Bonus (X2), Kepemilikan Asing (X3), <i>Tunelling Incentive</i> (X4) <i>Transfer Pricing</i> (Y)	Regresi Berganda	- Pajak dan Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> - Mekanisme Bonus dan <i>Tunelling Incentive</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>
4	Angga Kusuma Nunggraha (2016)	Analisis Pengaruh Beban Pajak, <i>Tunelling Incentive</i> , Dan Mekanisme Bonus Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Pajak (X1), <i>Tunelling Incentive</i> (X2) Dan Mekanisme Bonus (X3) <i>Transfer Pricing</i> (Y)	Regresi Logistik	- Beban Pajak, <i>Tunelling Incentive</i> dan Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>
5	Indah Lestari (2016)	- Pengaruh Pajak, <i>Tunelling Incentive</i> , Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Pajak (X1), <i>Tunelling Incentive</i> (X2), Dan Mekanisme Bonus (X3) <i>Transfer Pricing</i> (Y)	Regresi Logistik	- Pengaruh Pajak dan <i>Tunelling Incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>Transfer Pricing</i> - Mekanisme Bonus bonus berpengaruh terhadap <i>transfer Pricing</i>

Sumber: Berbagai Jurnal terdahulu yang Dipublikasikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

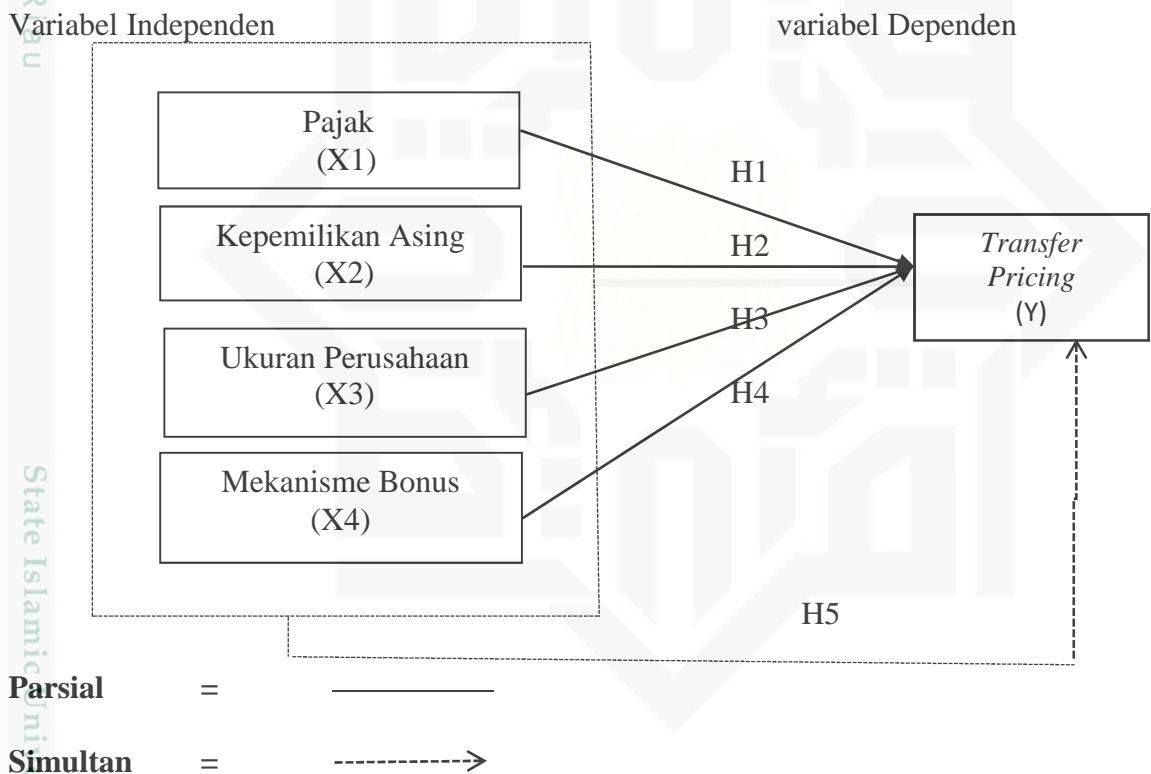
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Desain Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka variabel didalam penelitian ini adalah *Transfer Pricing* merupakan variabel independen. Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Mekanisme Bonus sebagai variabel independen. Untuk memudahkan dalam penelitian, dibuat suatu desain penelitian yang akan menjadi arahan dalam mselakukan pengumpulan data serta analisisnya. Desain penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat apada gambar berikut ini:



2.8 Penyembangan Hipotesis

2.8.1 Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Definisi pajak menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan

Praktik *transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara memperbesar harga beli atau memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di Negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu Negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan memanipulasi agar mengalihkan penghasilannya kepada perusahaan di Negara yang memiliki tarif pajaknya lebih sedikit. Namun karena belum tersedianya peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Julaikah, 2014).

Dalam Penelitian terdahulu mengenai pajak terhadap *transfer pricing* telah dilakukan diantaranya oleh Nancy Kiswanto (2014), Indah Lestari (2016), Novi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lailliyul Wafiroh (2014), Thesa Refgia (2017) yang menyatakan bahwa Pajak Berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

H₀ : Pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*

H₁ : Pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*

2.8.2 Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang memiliki oleh perorangan badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang dia kendalikan ke perusahaan pribadinya dengan harga dibawah pasar. Hal tersebut dilakukan pemegang saham pengendali asing untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pemegang saham non pengendali (Refgia, 2017). Ketika kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin tinggi maka pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan, termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah *transfer pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto dan Purwaningsih (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap kepurusan perusahaan untuk melaksanakan *transfer pricing* ketika pihak asing telah menanamkan modalnya kepada perusahaan publik Indonesia dengan presentase lebih dari 20% maka pihak asing bisa memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* yang melibatkan pihak asing. Semakin besar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pengaruh pihak asing dalam menentukan banyak sedikitnya *transfer pricing* yang dilakukan.

Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan disebut sebagai pemegang saham pengendali asing. Pemegang saham pengendalian asing dalam perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi akan lebih mementingkan kesejahteraannya.

Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain sering disebut sebagai ekspropriasi. Sebagai contoh, pemegang saham pengendali asing dapat mentransfer dana dan aset perusahaan lainnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Caranya melalui praktek *transfer pricing*: pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan kepada perusahaan pribadinya pada harga di bawah pasar. Ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali asing akan menurunkan nilai perusahaan sehingga merugikan pemegang saham non pengendali. (Refgia, 2017)

Dalam penelitian terdahulu mengenai kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* telah dilakukan diantaranya Nancy Kiswanto (2014), Thesa Refgia (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Maka dapat dirumuskan hipotesisny sebagai berikut:

H₀ : Kepemilikan asing tidak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*

H₂ : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8.3 Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing*

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai upaya penilaian besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Pada umumnya penelitian di Indonesia menggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan akan sangat penting bagi investor karena akan berhubungan dengan resiko investasi. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Transaksi *transfer pricing* merupakan salah satu upaya manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Ukuran perusahaan di Amerika Serikat berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014)

Transfer pricing dilakukan antar pihak yang berelasi atau yang mempunyai hubungan istimewa. Dengan demikian dapat dimungkinkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto (2014) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap besaran pengelolaan laba, artinya semakin besar ukuran perusahaan semakin kecil besaran pengelolaan labanya. Manajer yang memimpin perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan pengelolaan laba, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*, dibandingkan manajer di perusahaan kecil sebab perusahaan yang besar lebih diperhatikan masyarakat sehingga perusahaan besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H₀ : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif terhadap *Transfer pricing*

H₃ : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

2.8.4 Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*.

Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Maka, berdasarkan tingkat laba direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus. Bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota Direksi setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba. Sistem pemberian kompensasi bonus ini dapat membuat para pelaku terutama manajer perusahaan dapat melakukan perekayasa terhadap laporan keuangan perusahaan agar memperoleh mekanisme bonus yang maksimal. Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan untuk memperoleh bonus dalam mengelola perusahaan. Pemilik perusahaan tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang dapat menghasilkan laba untuk divisi atau subunit, tetapi juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. (Kiswanto, 2014)

Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan. Oleh sebab itu, direksi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu mengangkat laba pada tahun yang diharapkan yaitu dengan menjual persediaan kepada antarperusahaan satu grup dalam perusahaan multinasional dengan harga dibawah pasar. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan perusahaan dan meningkatkan laba pada tahun tersebut. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Nunggraha (2016) menemukan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Dapat disimpulkan manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari dewan direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih. (Lestari, 2016)

Dalam penelitian terdahulu mengenai mekanisme bonus terhadap transfer pricing telah dilakukan antara Angga Kusuma Nunggraha (2016), dan Indah Lestari (2016) yang menyatakan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₀ : Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*

H_a : Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

2.8.5 Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*.

Praktik *transfer pricing* sering kali dimanfaatkan oleh perusahaanperusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Praktik *transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara memperbesar harga beli atau memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan *mentransfer* laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di Negara yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan tarif pajak rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu Negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan memanipulasi agar mengalihkan penghasilannya kepada perusahaan di Negara yang memiliki tarif pajaknya lebih sedikit. Namun karena belum tersedianya peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* seringkali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing*. (Kiswanto, 2014)

Tantiem / bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota Direksi setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba. Sistem pemberian kompensasi bonus ini dapat membuat para pelaku terutama manajer diperusahaan dapat melakukan perekayasa terhadap laporan keuangan perusahaan agar memperoleh mekanisme bonus yang maksimal.

Tujuan penetapan *transfer pricing* sebagai berikut secara umum penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data diantara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu yang saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain.

Selain tujuan tersebut, *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam lingkup perusahaan *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan diseluruh dunia. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₀ : Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap *Transfer pricing*

H₁ : Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.